

**Strategy for Sustainable Use of Mangrove Ecosystem In Coastal Tatengesan,
Southeast Minahasa Regency****(Strategi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Ke Arah Berkelanjutan Di Pesisir Tatengesan
Kabupaten Minahasa Tenggara)****Yogo Pamungkas, Carolus Paulus Paruntu*, Antonius Petrus Rumengan, Indri Shelovita
Manembu, Calvyn Fredrik Aldus Sondak, Elvy Like Ginting²**¹Marine Science Study Program, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Sam Ratulangi
University, Manado 95115 North Sulawesi, Indonesia²Teaching Staff of the Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Sam Ratulangi University Jl.
Unsrat Bahu Campus, Manado 95115 North Sulawesi, Indonesia*Corresponding author: carolusparuntu@unsrat.ac.id

Manuscript received: 28 Sept 2023. Revision accepted: 24 Nov. 2023.

Abstract

The mangrove ecosystem area in the coastal area of Tatengesan Village, Pusomaen District, Southeast Minahasa Regency has been developed as a mangrove ecotourism area which has been managed by Village-Owned Enterprises (BUMD) since January 2019 with assistance from the Mandiri Rural National Community Empowerment Program (PNPM) team. The development of this mangrove ecotourism activity was stopped for a moment due to the impact of the COVID-19 pandemic, but currently, COVID-19 cases are considered endemic so this mangrove ecotourism activity will be developed again. This research aims to formulate some strategies for the sustainable use of the mangrove ecosystem on the Tatengesan coast, Southeast Minahasa Regency. This research lasted for 5 months, from September 2022 - February 2023. This research used descriptive qualitative methods with survey technique, i.e., in-depth direct interviews with resource persons (respondents). The formulation of priority strategies (key success factors) was analyzed using S.W.O.T and strategy choice analysis. This research produced 9 (nine) priority strategies as academic texts, which can be recommended to governments related to the marine and fisheries sector as elements of public policy-making officials.

Keywords: Tatengesan village, mangrove ecotourism, sustainable use, priority strategies.**Abstrak**

Kawasan ekosistem mangrove di wilayah pesisir Desa Tatengesan, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara dikembangkan sebagai kawasan ekowisata mangrove yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sejak Januari 2019 dengan pendampingan oleh tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kegiatan ekowisata mangrove ini pengembangannya terhenti sejenak dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, namun saat ini kasus Covid-19 sudah dianggap endemi sehingga kegiatan ekowisata mangrove ini akan dikembangkan kembali. Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan strategi pemanfaatan berkelanjutan ekosistem mangrove ke arah berkelanjutan di pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara. Riset ini berlangsung selama 5 bulan, dari September 2022 - Februari 2023. Riset ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik survei, yaitu wawancara langsung secara mendalam (*in-depth interview*) kepada narasumber (responden). Perumusan strategi prioritas (faktor kunci keberhasilan) di analisis dengan menggunakan S.W.O.T dan analisis pilihan strategi. Penelitian ini menghasilkan 9 (sembilan) strategi prioritas sebagai naskah akademik, yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah terkait pada sektor kelautan dan perikanan sebagai unsur pejabat pembuat kebijakan publik.

Kata kunci: Desa Tatengesan, ekowisata mangrove, pemanfaatan berkelanjutan, strategi prioritas.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai keanekaragaman sumber daya hayati yang tinggi dengan kawasan mangrove terluas di dunia (Noor, *dkk.*, 2006). Area mangrove di dunia memiliki luas sekitar 16.530.000 Ha, yang terdistribusi di wilayah Afrika sekitar 3.258.000 Ha, Amerika sekitar 5.831.000 Ha, dan Asia sekitar 7.441.000 Ha (Onrizal, 2010), dan luas mangrove di Indonesia kurang lebih 3.364.000 Ha. Mangrove Indonesia tergolong kategori mangrove lebat 3.121.239 Ha (93%), kategori mangrove sedang 188.363 Ha (5%) dan kategori mangrove jarang 54.474 Ha (2%) (KLHK, 2021). Luas hutan mangrove di Indonesia mencakup sekitar 45% dari luasan hutan mangrove Asia dan sekitar 20% dari luasan hutan mangrove di dunia (Onrizal, 2010).

Mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang hidup dan berkembang dengan baik pada daerah pasang surut pantai berlumpur, baik di daerah tropis maupun subtropis (Rahim dan Baderan, 2017). Komunitas tumbuhan mangrove ini pada umumnya tumbuh di area intertidal dan supratidal yang terlindung dari arus pasang surut dan gelombang besar, di sepanjang pantai daerah teluk, di sekitar muara sungai dan delta (Bengen, 2001; Mahi, 2016).

Mangrove dengan ekosistemnya memiliki sejumlah manfaat bagi keberlangsungan hidup umat manusia, sehingga pemanfaatan sumber daya mangrove dan biota-biota asosiasi yang hidup di dalamnya meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan hidup dan ekonomi dari masyarakat (Ely, *dkk.*, 2021). Mutohharoh (2020) menyatakan bahwa ekosistem mangrove mempunyai kegunaan untuk kehidupan manusia baik itu bermanfaat secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat mangrove secara langsung adalah manfaat yang digunakan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produksi

atau jasa pelayanan, seperti tempat untuk mencari hasil perikanan, pengembangan ekowisata, dan sumber obat-obatan; sedangkan manfaat mangrove secara tidak langsung adalah manfaat yang tidak digunakan atau dirasakan secara langsung, namun mempunyai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai habitat dan tempat mencari makan bagi berbagai biota laut, seperti udang, kepiting, burung, ikan, moluska, dan reptil; mencegah abrasi pantai, erosi, dan intrusi air laut; serta sebagai tempat menyaring bahan-bahan pencemaran yang berasal dari darat ke laut, antara lain sampah plastik, deterjen dan minyak bumi.

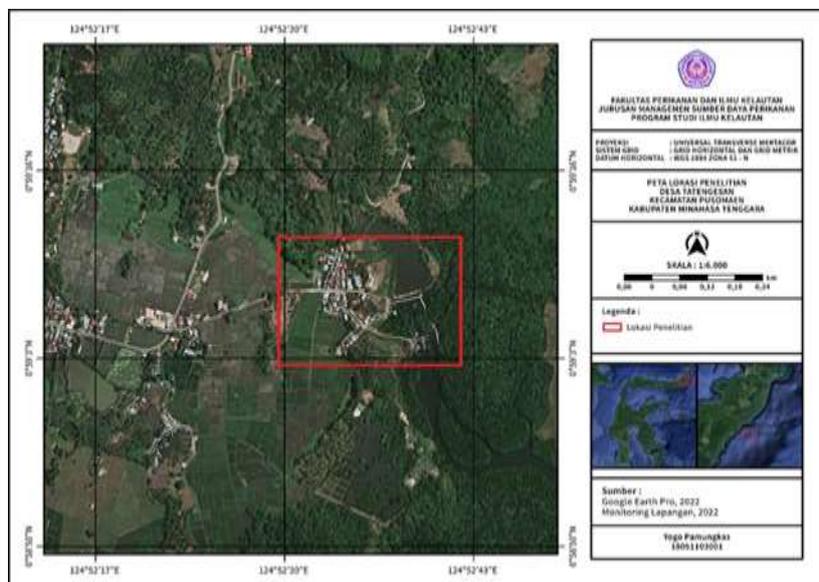
Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang hidup di sekitar wilayah ekosistem mangrove dapat menyebabkan terjadinya perubahan kawasan mangrove dan kemungkinan terjadinya kerusakan ekosistem mangrove. Eksploitasi kawasan mangrove berupa eksplorasi hasil hutan dan konversi kawasan mangrove untuk budidaya ikan, pertanian, perkebunan dan pertambangan masih terus terjadi hingga saat ini (Pramudji, 2002).

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai wilayah pesisir dengan luas wilayah 730,63 km² (BPS Kab. MITRA, 2022). Wilayah pesisir Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 3 (tiga) ekosistem besar, yaitu hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem mangrove di wilayah pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara, maka diperlukan kajian ilmiah untuk merumuskan strategi pengelolaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Riset ini bertujuan untuk merumuskan strategi prioritas dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove ke arah berkelanjutan di pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk rumusan strategi prioritas, yang dapat digunakan oleh pemerintah terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan

Prov. SULUT sebagai naskah akademik dalam membuat kebijakan publik pada sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di pesisir Tatengesan Kabupaten Minahasa Tenggara (Gambar 1). Periode penelitian berlangsung selama 5 bulan, dari September 2022 - Februari 2023..



Gambar 1. Peta Lokasi penelitian

Metode Penelitian

Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah riset yang dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui deskripsi atau gambaran tentang keadaan obyek secara keseluruhan dan sifatnya berupa kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh manusia atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010). Data riset ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan mendalam (*in-depth interview*) kepada para *stakeholders* sebagai responden (narasumber) dengan teknik survei (wawancara) menggunakan kuesioner. Data S.W.O.T meliputi data primer dan sekunder (Suntoyo, 2013). Data primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau catatan resmi yang berada pada instansi terkait dan sumber lainnya yang resmi. Data sekunder meliputi data ekonomi, sosial budaya, bioekologi, hukum, kelembagaan, dan infrastruktur yang tertuang dalam dokumen resmi

pemerintah dan swasta atau *stakeholders*. Narasumber dalam riset ini adalah para pejabat dari instansi/lembaga terkait, seperti kepala departemen/lembaga, pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM), ketua kelompok, dan pemerintah desa.

Analisis Data

Data S.W.O.T dianalisis dengan menggunakan analisis S.W.O.T dan analisis pilihan strategi untuk mendapatkan strategi prioritas sebagai faktor kunci keberhasilan (Rangkuti, 1997; Paruntu dan Rumengan, 2018; Paruntu *dkk.*, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi, Misi dan Nilai-Nilai

Visi pembangunan kelautan dan perikanan berasal dari visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2021-2026, secara khusus Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: "Memperkuat Ketahanan Ekonomi dengan Meningkatkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Mandiri dengan Pengelolaan Sumber Daya secara Berkelanjutan" (Renstra

DKPD Prov. SULUT 2021-2026). Selanjutnya, dari 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, misi yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah misi yang kedua, yaitu: “Memperkuat Perekonomian Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, Parawisata, dan Jasa”. Nilai-nilai kepemimpinan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. SULUT periode 2021-2026, yang mengacu pada Posundu, *dkk.* (2015), yaitu: 1. Akuntabilitas, 2. Taat hukum, dan 3. Transparansi.

Lingkungan Strategi

Lingkungan strategi organisasi pengelola (DKPD Prov. SULUT) meliputi faktor kekuatan dan kelemahan internal dari organisasi, dan juga faktor peluang dan ancaman eksternal dari organisasi.

Faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Dari KAFI dan KAFE diatas, maka tahapan selanjutnya adalah menentukan asumsi-asumsi strategis, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan faktor kunci keberhasilan (FKK). Untuk dapat sampai pada perumusan faktor kunci keberhasilan (FKK), di atas telah dilakukan langkah-langkah telaah strategik yang berupa PLI, PLE, dan KAFI, KAFE, kemudian dilanjutkan pada matriks analisis S.W.O.T (Tabel 4).

Tabel 1. Faktor lingkungan internal (FLI) dan faktor lingkungan eksternal (FLE) organisasi

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
F L I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah pesisir Tatengesan memiliki luas wilayah 450 Ha dan luas mangrove 111,3 Ha (24,73%). 60,6 Ha luasan mangrove tersebut berada dalam kondisi lebat atau nilai penutupan mangrovenya ≥ 75. Disamping itu adanya biota asosiasi, seperti reptil, burung, ular, ikan, udang, kepiting, moluska, dan lain-lain. 2. Nilai IKW (Indeks Kesesuaian Ekowisata) hampir semua stasiun penelitian menunjukkan nilai yang sesuai. 3. Daya dukung ekowisata mangrove Tatengesan sebesar 116 orang/hari untuk penggunaan luasan mangrove 3.000 m² dengan waktu operational 14 jam. 4. Adanya suatu wilayah pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya yang dijadikan kawasan ekowisata mangrove berbasis konservasi, yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), serta didampingi oleh Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. 5. Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kab. MITRA yang merupakan perpanjangan tugas dari DKPD Prov. SULUT dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD), Kab. MITRA tentang program/kegiatan rehabilitasi mangrove di Desa Tatengesan sejak Tahun 2020. 6. Struktur kepemimpinan DKPD Prov. SULUT didominasi oleh sumber daya aparatur negara yang berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan, yaitu sebesar sekitar 80%. 7. Adanya Bidang PRL-PSDKP di DKPD Prov. SULUT yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan, bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang pemanfaatan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya program dan kegiatan dari DKPD Prov. SULUT sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir, khususnya ekosistem mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya di Kab. MITRA yang telah dijadikan kawasan ekowisata mangrove oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat. 2. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir Tatengesan dari pihak DKPD Prov. SULUT terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. 3. Sebagian wilayah ekosistem mangrove masih menunjukkan nilai IKW adalah sesuai bersyarat. 4. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan belum memadai. Hasil survei ditemukan adanya beberapa unsur penunjang yang tidak terawat lagi, seperti <i>tracking</i> mangrove yang berlubang, gazebo dan aula yang rusak, area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, hal ini terjadi khususnya pada masa pandemi Covid-19. 5. Belum adanya forum komunikasi/lembaga resmi yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, instansi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat sebagai stakeholders yang terkait dalam rangka pengembangan ekowisata berbasis mangrove.

	<p>8. Adanya UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Kelas A DKPD Prov. SULUT di Kab. MITRA, yang memiliki tupoksi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, karantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengelolaan hasil perikanan; - Kegiatan pengumpulan informasi, data dan publikasi; - Kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. 	
	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
F L E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sumber daya manusia, komunitas masyarakat pesisir di Desa Tatengesan dengan jumlah penduduk sebanyak 811 jiwa, yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis hampir 100%, di antaranya bekerja sebagai pedagang dan pembudidaya ikan, nelayan, dan lain-lain yang memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai ekosistem penunjang bagi kehidupan mereka. 2. Adanya program pengadaan bibit mangrove oleh Dinas Kehutanan (DISHUT) Daerah Prov. SULUT yang akan direalisasikan pada tahun 2023 di Desa Tatengesan. 3. UU No. 1 Tahun 2014 pada Bab IV tentang perencanaan dalam pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, termasuk di dalamnya sumber daya ekosistem mangrove. 4. Adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Tatengesan yang dibentuk pada tahun 2020, dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove; - Sebagai mitra kerja dari <i>stakeholders</i> untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan; - Mempromosikan potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Tatengesan. 5. Memiliki budaya lokal yaitu menjaga ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut. 6. Desa Tatengesan memiliki kearifan lokal berupa musik bambu yang dapat dijadikan ajang promosi tentang kesenian musik Sulawesi Utara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhentinya kucuran dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) ataupun dari Pemerintah Kab. MITRA dan Pemerintah Prov. SULUT, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah diinisiasi pembangunannya pada Tahun 2019. 2. Sebagian besar masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya masih kurang memahami tentang peran, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, serta pengelolaannya dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan, karena kurangnya edukasi dalam bentuk pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dari instansi terkait. 3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya berada pada tingkat kesejahteraan menengah hingga rendah, sedangkan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, dan untuk kehidupan jangka panjang, hal ini dapat memberikan tekanan lingkungan pada ekosistem mangrove yang berada pada wilayah tersebut. 4. Dalam Renstra Perubahan DISPARBUD Kab. MITRA 2018-2023 belum mencantumkan program pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan. 5. Kelompok Sadar Wisata yang telah dibentuk tidak berjalan dengan semestinya karena setelah dibentuk, ekowisata mangrove ditutup karena adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

FAKTOR INTERNAL	Bobot	Rating	SCORE (Bobot x Rating)	PRIORITAS
Kekuatan :				
1. Wilayah pesisir Tatengesan memiliki luas wilayah 450 Ha dan luas mangrove 111,3 Ha (24,73%). 60,6 Ha luasan mangrove tersebut berada dalam kondisi lebat atau nilai penutupan mangrovenya ≥ 75 . Disamping itu adanya biota asosiasi, seperti reptil, burung, ular, ikan, udang, kepiting, moluska, dan lain-lain.	8,5	4	34	VI
2. Nilai IKW (Indeks Kesesuaian Ekowisata) hampir semua stasiun penelitian menunjukkan nilai yang sesuai.	8	4	32	IV
3. Daya dukung ekowisata mangrove Tatengesan sebesar 116 orang/hari untuk penggunaan luasan mangrove 3.000 m ² dengan waktu operasional 14 jam.	7,5	4	30	V
4. Adanya suatu wilayah pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya yang dijadikan kawasan ekowisata mangrove berbasis konservasi, yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), serta didampingi oleh Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan	7,5	4	30	II

Masyarakat Desa) dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.				
5. Adanya kerjasama Dinas Perikanan Kab. MITRA yang merupakan perpanjangan tugas dari DKPD Prov. SULUT dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD), Kab. MITRA tentang program/kegiatan rehabilitasi mangrove di Desa Tatengesan sejak Tahun 2020.	7	3	21	VII
6. Struktur kepemimpinan DKPD Prov. SULUT didominasi oleh sumber daya aparatur negara yang berlatar belakang bidang kelautan dan perikanan, yaitu sebesar sekitar 80%.	7	3	21	VIII
7. Adanya Bidang PRL-PSDKP di DKPD Prov. SULUT yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan, bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang pemanfaatan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	7	4	28	III
8. Adanya UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Kelas A DKPD Prov. SULUT di Kab. MITRA, yang memiliki tupoksi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, karantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengelolaan hasil perikanan; - Kegiatan pengumpulan informasi, data dan publikasi; - Kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. 	7	3	21	I
Kelemahan :				
1. Masih kurangnya program dan kegiatan dari DKPD Prov. SULUT sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir, khususnya ekosistem mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya di Kab. MITRA yang telah dijadikan kawasan ekowisata mangrove oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat.	8,5	4	34	I
2. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir Tatengesan dari pihak DKPD Prov. SULUT terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.	8,5	4	34	II
3. Sebagian wilayah ekosistem mangrove masih menunjukkan nilai IKW adalah sesuai bersyarat.	7	3	21	V
4. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan belum memadai. Hasil survei ditemukan adanya beberapa unsur penunjang yang tidak terawat lagi, seperti <i>tracking</i> mangrove yang berlubang, gazebo dan aula yang rusak, area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, hal ini terjadi khususnya pada masa pandemi Covid-19.	8,5	4	34	III
5. Belum adanya forum komunikasi/lembaga resmi yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, instansi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat sebagai stakeholders yang terkait dalam rangka pengembangan ekowisata berbasis mangrove.	8	4	32	IV
JUMLAH	100			

Tabel 3. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAPE)

FAKTOR EKSTERNAL	Bobot	Rating	SCORE (Bobot x Rating)	PRIORITAS
Peluang :				
1. Adanya sumber daya manusia, komunitas masyarakat pesisir di Desa Tatengesan dengan jumlah penduduk sebanyak 811 jiwa, yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis hampir 100%, di antaranya bekerja sebagai pedagang dan pembudidaya ikan, nelayan, dan lain-lain yang memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai ekosistem penunjang bagi kehidupan mereka.	9	4	36	I
2. Adanya program pengadaan bibit mangrove oleh Dinas Kehutanan (DISHUT) Daerah Prov. SULUT yang akan direalisasikan pada tahun 2023 di Desa Tatengesan.	9	4	36	IV
3. UU No. 1 Tahun 2014 pada Bab IV tentang perencanaan dalam pasal 9 ayat (1), disebutkan bahwa RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota, termasuk di dalamnya sumber daya ekosistem mangrove.	8	4	32	V

4. Adanya Kelompok Sadar Wisata Desa Tatengesan yang dibentuk pada tahun 2020, dengan tujuan: - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove; - Sebagai mitra kerja dari <i>stakeholders</i> untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan; - Mempromosikan potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Tatengesan.	9	4	36	II
5. Memiliki budaya lokal yaitu menjaga ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut.	9	4	36	III
6. Desa Tatengesan memiliki kearifan lokal berupa musik bambu yang dapat dijadikan ajang promosi tentang kesenian musik Sulawesi Utara.	8	3	24	VI
Ancaman				
1. Berhentinya kucuran dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ataupun dari Pemerintah Kab. MITRA dan Pemerintah Prov. SULUT, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah diinisiasi pembangunannya pada Tahun 2019.	10	4	40	II
2. Sebagian besar masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya masih kurang memahami tentang peran, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, serta pengelolannya dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan, karena kurangnya edukasi dalam bentuk pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dari instansi terkait.	10	4	40	I
3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya berada pada tingkat kesejahteraan menengah hingga rendah, sedangkan kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, dan untuk kehidupan jangka panjang, hal ini dapat memberikan tekanan lingkungan pada ekosistem mangrove yang berada pada wilayah tersebut.	9	3	27	V
4. Dalam Renstra Perubahan DISPARBUD Kab. MITRA 2018-2023 belum mencantumkan program pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan.	9,5	4	38	III
5. Kelompok Sadar Wisata yang telah dibentuk tidak berjalan dengan semestinya karena setelah dibentuk, ekowisata mangrove ditutup karena adanya pandemi Covid-19.	9,5	4	38	IV
JUMLAH	100			

Tabel 4. Matriks analisis S.W.O.T

<p>KAFI</p> <p>KAFE</p>	KEKUATAN (S)		KELEMAHAN (W)	
	1.	Adanya UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (BP3) Wilayah II Kelas A DKPD Prov. SULUT di Kab. MITRA, yang memiliki tupoksi, yaitu: - Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, karantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengelolaan hasil perikanan; - Kegiatan pengumpulan informasi, data dan publikasi; - Kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.	1.	Masih kurangnya program dan kegiatan dari DKPD Prov. SULUT sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir, khususnya ekosistem mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya di Kab. MITRA yang telah dijadikan kawasan ekowisata mangrove oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat.
2.	Adanya suatu wilayah pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya yang dijadikan kawasan ekowisata mangrove berbasis konservasi, yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), serta didampingi oleh Satker P3MD	2.	Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir Tatengesan dari pihak DKPD Prov. SULUT terkait dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.	

		(Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.	
	3.	Adanya Bidang PRL-PSDKP di DKPD Prov. SULUT yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan, bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di bidang pemanfaatan ruang laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.	3. Sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan belum memadai. Hasil survei ditemukan adanya beberapa unsur penunjang yang tidak terawat lagi, seperti <i>tracking</i> mangrove yang berlubang, gazebo dan aula yang rusak, area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/ tanaman liar, hal ini terjadi khususnya pada masa pandemi Covid-19.
PELUANG (O)		STRATEGI (SO)	
1.	Adanya sumber daya manusia, masyarakat pesisir di Desa Tatengesan dengan jumlah penduduk sebesar 811 jiwa, yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis hampir 100%, di antaranya bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan dan lain-lain yang memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai ekosistem penunjang kehidupan mereka.	1.1 UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA memberdayakan masyarakat pesisir Desa Tatengesan dengan memberikan penyuluhan untuk peningkatan SDM, secara bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan wilayah pesisir dan potensi wisata bahari, pembinaan mutu hasil perikanan, pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi dan melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pada ekosistem mangrove.	1.1; 1.2; 1.3 DKPD Prov. SULUT perlu meningkatkan jumlah program dan kegiatan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan, seperti program pendidikan dan pelatihan (Diklat atau Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove dan regulasi- regulasi terkait; program rehabilitasi mangrove; program pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan; program pembentukan sadar wisata; program peningkatan partisipasi masyarakat melalui budaya lokal.
2.	Adanya kelompok sadar wisata Desa Tatengesan yang dibentuk pada tahun 2020, dengan tujuan: - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove; - Sebagai mitra kerja dari <i>stakeholders</i> untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan; - Mempromosikan potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Tatengesan;	1.2 Kelompok sadar wisata Desa Tatengesan mengajak kerjasama UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA dalam rangka: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove; 2) Sebagai mitra kerja dari <i>stakeholders</i> untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan; 3) Mempromosikan potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Tatengesan.	2.1; 2.2; 2.3 DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan akademisi memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir, termasuk kelompok sadar wisata Desa Tatengesan dan sekitarnya melalui pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
3.	Memiliki budaya lokal yaitu menjaga ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut.	1.3 UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA mendukung budaya lokal masyarakat setempat dalam menjaga ekosistem mangrove dengan tidak	3.1; 3.2; 3.3 Memberdayakan masyarakat pesisir termasuk kelompok sadar wisata dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan, seperti memperbaiki <i>tracking</i> mangrove,

	<p>Memiliki budaya lokal yaitu menjaga ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut.</p>	<p>menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut melalui program kegiatan penyuluhan, pemantauan, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan mutu hasil perikanan sehubungan dengan tupoksi UPTD ini.</p> <p>Pemerintah Desa melalui BUMD</p> <p>2.1; Tatengesan memberdayakan masyarakat pesisir terlibat langsung bersama kelompok sadar wisata dalam pengelolaan ekowisata mangrove dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal.</p> <p>2.2;</p> <p>2.3</p> <p>Bidang PRL-PSDKP DKPD Prov. SULUT bertugas untuk</p> <p>3.1; mengedukasi masyarakat</p> <p>3.2; pesisir, termasuk kelompok sadar wisata Desa Tatengesan dan sekitarnya melalui</p> <p>3.3 pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka keberlanjutan ekowisata mangrove berbasis kearifan lokal.</p>	<p>Gazebo, Aula dan area parkir yang rusak, membersihkan area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, menyiapkan lokasi tempat-tempat pembuangan sampah laut, memperkuat pelaksanaan peraturan lokal berbasis budaya tentang pelarangan menebang pohon mangrove, serta bersama Pemerintah Desa dan Daerah melengkapi sarana dan prasarana lainnya sebagai satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari.</p>
ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)	
<p>1.</p>	<p>Sebagian besar masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya masih kurang memahami tentang peran, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove, serta pengelolaannya dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan, karena kurangnya edukasi dalam bentuk pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi dari instansi terkait.</p>	<p>1.1; DKPD Prov. SULUT</p> <p>2.1 bekerjasama dengan akademisi terkait dari perguruan tinggi, seperti UNSRAT dan UNIMA memberikan edukasi tentang pengetahuan ekowisata bahari (khususnya ekosistem mangrove) dan segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sedang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pendamping Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>1.1; DKPD Prov. SULUT</p> <p>2.1; bekerjasama dengan pihak akademisi mengadakan program edukasi kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya, seperti bimtek, penyuluhan, serta sosialisasi tentang pengetahuan ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.</p>
<p>2.</p>	<p>Berhentinya kucuran dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ataupun dari Pemerintah Kab. MITRA dan Pemerintah Prov. SULUT, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehubungan dengan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah diinisiasi pembangunannya pada Tahun 2019.</p>	<p>1.2; Melanjutkan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya melalui tindak</p> <p>1.3;</p> <p>3.2;</p> <p>3.3</p>	<p>1.2; Meningkatkan dan mewujudkan program dan kegiatan dalam</p> <p>1.3; Renstra DKPD Prov. SULUT dan</p> <p>2.3 DISPARBUD Kab. MITRA sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya, seperti program rehabilitasi lingkungan pesisir, program infrastruktur ekowisata bahari, program peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir, dan lain-lain.</p>

3.	Dalam Renstra Perubahan DISPARBUD Kab. MITRA 2018-2023 belum mencantumkan program pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan.	<p>2.2; 2.3</p> <p>lanjut penganggaran dari KEMENDES PDPT, Pemerintah Daerah (DKPD) Prov. SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA.</p> <p>Pemerintah Desa Tatengesan melalui BUMD sebagai pengelola ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan mengajukan proposal pengucuran dana lanjutan kepada KEMENDES PDPT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD Kab. MITRA) dan DKPD Prov. SULUT dalam rangka tindak lanjut pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.</p> <p>3.1 DKPD Prov. SULUT melalui Bidang PRL-PSDKP bertugas memberikan edukasi melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan.</p>	3.1; 3.2; 3.3	Pemerintah Desa Tatengesan dan sekitarnya bersama BUMD memberdayakan masyarakat pesisir setempat dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah terlantar dan rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di masa pandemi Covid-19 dengan meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (seperti KEMENDES PDPT) dan Pemda Prov. SULUT dan Kab. MITRA melalui dinas terkait.
----	--	---	---------------------	--

Tabel 5. Penetapan urutan asumsi strategi pilihan untuk FKK

ASUMSI STRATEGI		KETERKAITAN DENGAN									URUTAN PILIHAN ASUMSI		
		VISI					MISI			NILAI			
		1	2	3	4	5	1	2	3	1		2	3
A. STRATEGI (SO)													
1.1	UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA memberdayakan masyarakat pesisir Desa Tatengesan dengan memberikan penyuluhan untuk peningkatan SDM, secara bersama-sama melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan wilayah pesisir dan potensi wisata bahari, pembinaan mutu hasil perikanan, pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi dan melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pada ekosistem mangrove.	4	2	3	3	3	2	3	2	3	25		
1.2	Kelompok sadar wisata Desa Tatengesan mengajak kerjasama UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA dalam rangka: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pembentukan desa ekowisata mangrove; 2) Sebagai mitra kerja dari stakeholders untuk mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata masyarakat di Desa Tatengesan; 3) Mempromosikan potensi daya tarik ekowisata mangrove di Desa Tatengesan.	4	3	2	2	3	2	3	2	3	24		
1.3	UPTD BP3 Wilayah II Kelas A Kab. MITRA mendukung budaya lokal masyarakat setempat dalam menjaga ekosistem mangrove dengan tidak menebang pohon mangrove dan membuang sampah di laut melalui program kegiatan penyuluhan, pemantauan, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan mutu hasil perikanan sehubungan dengan tupoksi UPTD ini.	4	3	3	3	2	2	3	2	3	25		
2.1; 2.2; 2.3	Pemerintah Desa melalui BUMD Tatengesan memberdayakan masyarakat pesisir terlibat langsung bersama kelompok sadar wisata dalam pengelolaan ekowisata mangrove dalam rangka percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan lokal.	4	3	3	2	3	2	3	2	3	25		

3.1; 3.2; 3.3	Bidang PRL-PSDKP DKPD Prov. SULUT bertugas untuk mengedukasi masyarakat pesisir, termasuk kelompok sadar wisata Desa Tatengesan dan sekitarnya melalui pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka keberlanjutan ekowisata mangrove berbasis kearifan lokal.	4	3	3	2	3	2	3	2	2	24
B. STRATEGI (WO)											
1.1; 1.2; 1.3	DKPD Prov. SULUT perlu meningkatkan jumlah program dan kegiatan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan, seperti program pendidikan dan pelatihan (Diklat atau Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove dan regulasi-regulasi terkait; program rehabilitasi mangrove; program pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan; program pembentukan sadar wisata; program peningkatan partisipasi masyarakat melalui budaya lokal.	4	3	3	3	3	2	3	2	3	26 (IX)
2.1; 2.2; 2.3	DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan akademisi memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir, termasuk kelompok sadar wisata Desa Tatengesan dan sekitarnya melalui pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan berbasis kearifan lokal.	4	3	3	2	3	3	3	2	2	25
3.1; 3.2; 3.3	Memberdayakan masyarakat pesisir termasuk kelompok sadar wisata dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan, seperti memperbaiki <i>tracking</i> mangrove, Gazebo, Aula dan area parkir yang rusak, membersihkan area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, menyiapkan lokasi tempat-tempat pembuangan sampah laut, memperkuat pelaksanaan peraturan lokal berbasis budaya tentang pelarangan menebang pohon mangrove, serta bersama Pemerintah Desa dan Daerah melengkapi sarana dan prasarana lainnya sebagai satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari.	4	3	3	3	4	2	3	2	3	27 (VIII)
C. STRATEGI (ST)											
1.1; 2.1	DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan akademisi terkait dari perguruan tinggi, seperti UNSRAT dan UNIMA memberikan edukasi tentang pengetahuan ekowisata bahari (khususnya ekosistem mangrove) dan segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sedang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pendamping Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.	4	4	4	3	4	4	4	3	4	34 (I)
1.2; 1.3; 3.2; 3.3	Melanjutkan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya melalui tindak lanjut penganggaran dari KEMENDES PDPT, Pemerintah Daerah (DKPD) Prov. SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA.	4	3	3	4	4	2	3	2	3	28 (VII)
2.2; 2.3	Pemerintah Desa Tatengesan melalui BUMD sebagai pengelola ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan mengajukan proposal pengucuran dana lanjutan kepada KEMENDES PDPT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD Kab. MITRA) dan DKPD Prov. SULUT dalam rangka tindak lanjut pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.	4	3	3	4	4	3	3	3	3	30 (V)
3.1	DKPD Prov. SULUT melalui Bidang PRL-PSDKP bertugas memberikan edukasi melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan.	4	4	4	3	3	4	4	3	3	32 (III)
D. STRATEGI (WT)											

1.1; 2.1; 2.2	DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan pihak akademisi mengadakan program edukasi kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya, seperti bimtek, penyuluhan, serta sosialisasi tentang pengetahuan ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.	4	3	4	3	4	3	4	3	3	31 (IV)
1.2; 1.3; 2.3	Meningkatkan dan mewujudkan program dan kegiatan dalam Renstra DKPD Prov. SULUT dan DISPARBUD Kab. MITRA sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya, seperti program rehabilitasi lingkungan pesisir, program infrastruktur ekowisata bahari, program peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir, dan lain-lain.	4	4	4	3	4	4	4	3	3	33 (II)
3.1; 3.2; 3.3	Pemerintah Desa Tatengesan dan sekitarnya bersama BUMD memberdayakan masyarakat pesisir setempat dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah terlanjar dan rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di masa pandemi Covid-19 dengan meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (seperti KEMENDES PDTT) dan Pemda Prov. SULUT dan Kab. MITRA melalui dinas terkait.	4	3	3	4	4	2	3	3	3	29 (VI)

Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan analisis matriks S.W.O.T dalam Tabel 4 di atas diperoleh 15 (lima belas) strategi, yang kemudian dalam analisis pilihan strategi terpilih 9 (sembilan) strategi urutan teratas (strategi prioritas) sebagai faktor kunci keberhasilan (Lihat Tabel. 5) dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove ke arah berkelanjutan di wilayah pesisir Tatengesan, Kab. MITRA. Faktor kunci keberhasilan tersebut, sebagai berikut: 1) DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan akademisi terkait dari perguruan tinggi, seperti UNSRAT dan UNIMA memberikan edukasi tentang pengetahuan ekowisata bahari (khususnya ekosistem mangrove) dan segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sedang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pendamping Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Irman & Akbar (2021) menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan ekowisata bahari, masyarakat pesisir perlu diberikan edukasi tentang pengetahuan ekologi dan

pengelolaan ekowisata, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian masyarakat yang terkena dampak dan percepatan pencapaian kemandirian secara berkelanjutan kawasan mangrove yang mereka kelola; 2) Meningkatkan dan mewujudkan program dan kegiatan dalam Renstra DKPD Prov. SULUT dan DISPARBUD Kab. MITRA sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya, seperti program rehabilitasi lingkungan pesisir, program infrastruktur ekowisata bahari, program peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir, dan lain-lain. Arbain & Chairiyah (2020) menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola mangrove berdasarkan prinsip kemanfaatan dan keberlanjutan, keadilan, kerakyatan, keterbukaan, kebersamaan, dan keselarasan. Kebijakan pemerintah daerah yang diambil untuk pengelolaan mangrove akan mempengaruhi kelestarian dan keberadaan hutan mangrove untuk pengembangan ekowisata; selanjutnya melestarikan hutan mangrove bukan hanya tugas pemerintah saja, namun juga memerlukan kerja sama masyarakat setempat; 3) DKPD Prov. SULUT melalui Bidang PRL-PSDKP bertugas memberikan edukasi melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan

penyuluhan tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan. Mu'tashim & Indahsari (2021) menyatakan bahwa tujuan dari bimbingan teknis, pembinaan, serta penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah mendukung usaha konservasi alam dan lingkungan, serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar melalui pengelolaan ekowisata yang tepat, sehingga berdampak positif bagi kelestarian alam dan ekonomi masyarakat; 4) DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan pihak akademisi mengadakan program edukasi kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya, seperti bimtek, penyuluhan, serta sosialisasi tentang pengetahuan ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya. Yoeti (2006) menyatakan bahwa penawaran produk ekowisata harus diimbangi dengan tingkat kompetensi tertentu dari pihak pengelola melalui tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan unggul dalam rangka pengembangan wisata bahari berkelanjutan; 5) Pemerintah Desa Tatengesan melalui BUMD sebagai pengelola ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan mengajukan proposal pengucuran dana lanjutan kepada KEMENDES PDTT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD Kab. MITRA) dan DKPD Prov. SULUT dalam rangka tindak lanjut pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya. Remus (2021) menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian daerah; selanjutnya penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan guna meningkatkan

pemanfaatan potensi yang dimiliki secara optimal; 6) Pemerintah Desa Tatengesan dan sekitarnya bersama BUMD memberdayakan masyarakat pesisir setempat dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah terlanjar dan rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di masa pandemi Covid-19 dengan meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (seperti KEMENDES PDTT) dan Pemda Prov. SULUT dan Kab. MITRA melalui dinas terkait. Menurut Teh & Cabanban (2007), bahwa produk ekowisata di kawasan mangrove yang ditawarkan kepada wisatawan harus nyaman dan aman, keberadaan infrastruktur jalan menuju objek wisata dalam kondisi baik, serta mempunyai fasilitas yang memadai; 7) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya melalui tindak lanjut penganggaran dari KEMENDES PDTT, Pemerintah Daerah (DKPD) Prov. SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA. Sasatrayuda (2010) menyatakan bahwa tujuan pengembangan ekowisata adalah untuk meningkatkan kesadaran budaya dan lingkungan di area wisata di kalangan wisatawan, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait; mengurangi dampak negatif, seperti pencemaran, kerusakan lingkungan atau budaya lokal akibat kegiatan ekowisata; serta mengembangkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang berbasis nilai keunikan budaya lokal; 8) Memberdayakan masyarakat pesisir termasuk kelompok sadar wisata dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan, seperti memperbaiki *tracking* mangrove, Gazebo, Aula dan area parkir yang rusak, membersihkan area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, menyiapkan lokasi tempat-tempat pembuangan sampah laut, memperkuat pelaksanaan peraturan lokal berbasis budaya tentang pelarangan menebang

pohon mangrove, serta bersama Pemerintah Desa dan Daerah melengkapi sarana dan prasarana lainnya sebagai satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari. Ayob, dkk. (2009) menyatakan bahwa peningkatan sarana dan prasarana kegiatan ekowisata mangrove harus berdasarkan pada aspek keselamatan, tata ruang, konservasi, dan kenyamanan dari pengunjung; 9) DKPD Prov. SULUT perlu meningkatkan jumlah program dan kegiatan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan, seperti program pendidikan dan pelatihan (Diklat atau Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut, termasuk ekosistem mangrove dan regulasi-regulasi terkait; program rehabilitasi mangrove; program pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan; program pembentukan sadar wisata; program peningkatan partisipasi masyarakat melalui budaya lokal. Pengelolaan ekowisata mangrove di pesisir Desa Tatengesan sepenuhnya melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut. Hadi (2005) menyatakan bahwa partisipasi dan peran masyarakat adalah suatu proses pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu diperolehnya rumusan 9 (sembilan) strategi prioritas dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove ke arah keberlanjutan di wilayah pesisir Tatengesan, Kab. MITRA, sebagai berikut:

1. DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan akademisi terkait dari perguruan tinggi, seperti UNSRAT dan UNIMA memberikan edukasi tentang pengetahuan ekowisata bahari (khususnya ekosistem mangrove) dan segala peraturan perundang-undangan terkait kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya dalam rangka pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sedang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD), yang kegiatannya dimulai awal Januari 2019 dengan pendamping Satker P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan dan mewujudkan program dan kegiatan dalam Renstra DKPD Prov. SULUT dan DISPARBUD Kab. MITRA sehubungan dengan pengembangan dan keberlanjutan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya, seperti program rehabilitasi lingkungan pesisir, program infrastruktur ekowisata bahari, program peningkatan kapasitas SDM masyarakat pesisir, dan lain-lain.
3. DKPD Prov. SULUT melalui Bidang PRL-PSDKP bertugas memberikan edukasi melalui kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi tentang pemanfaatan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan.
4. DKPD Prov. SULUT bekerjasama dengan pihak akademisi mengadakan program edukasi kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan dan sekitarnya, seperti bimtek, penyuluhan, serta sosialisasi tentang pengetahuan ekologi dan manajemen pesisir dan laut dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.
5. Pemerintah Desa Tatengesan melalui BUMD sebagai pengelola ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan mengajukan proposal pengucuran dana lanjutan kepada KEMENDES PD TT, Pemerintah Kab. MITRA (DISPARBUD Kab. MITRA) dan DKPD Prov. SULUT dalam rangka tindak

lanjut pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya.

6. Pemerintah Desa Tatengesan dan sekitarnya bersama BUMD memberdayakan masyarakat pesisir setempat dalam rangka rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan yang sudah terlantar dan rusak atau tidak terawat lagi disebabkan tidak ada aktivitas di masa pandemi Covid-19 dengan meminta bantuan/dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (seperti KEMENDES PDPT) dan Pemda Prov. SULUT dan Kab. MITRA melalui dinas terkait.
7. Melanjutkan pembangunan dan pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan dan sekitarnya melalui tindak lanjut penganggaran dari KEMENDES PDPT, Pemerintah Daerah (DKPD) Prov. SULUT dan Pemerintah Kab. MITRA.
8. Memberdayakan masyarakat pesisir termasuk kelompok sadar wisata dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan, seperti memperbaiki *tracking* mangrove, Gazebo, Aula dan area parkir yang rusak, membersihkan area parkir yang sudah ditumbuhi rumput/tanaman liar, menyiapkan lokasi tempat-tempat pembuangan sampah laut, memperkuat pelaksanaan peraturan lokal berbasis budaya tentang pelarangan menebang pohon mangrove, serta bersama Pemerintah Desa dan Daerah melengkapi sarana dan prasarana lainnya sebagai satu kesatuan fasilitas ekowisata bahari.
9. DKPD Prov. SULUT perlu meningkatkan jumlah program dan kegiatan kepada masyarakat pesisir Desa Tatengesan, seperti program pendidikan dan pelatihan (Diklat atau Bimtek), penyuluhan dan sosialisasi tentang kelestarian dan keberlanjutan wilayah pesisir dan laut, termasuk

ekosistem mangrove dan regulasi-regulasi terkait; program rehabilitasi mangrove; program pengembangan ekowisata mangrove di pesisir Tatengesan; program pembentukan sadar wisata; program peningkatan partisipasi masyarakat melalui budaya lokal.

Saran

Sehubungan dengan pengembangan ekowisata mangrove yang sudah dibentuk dan dikelola sejak tahun 2019 oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dengan pendampingan dari Tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, maka 9 (sembilan) strategi prioritas yang diperoleh di atas direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah (DKPD) Prov. SULUT sebagai naskah akademik atau bahan pertimbangan dalam rangka pembuatan kebijakan publik di bidang kelautan dan perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, khususnya kepada *stakeholders* dan para pejabat terkait, seperti dari DKPD Prov. SULUT, Dinas Kehutanan Daerah Prov. SULUT, Pemerintah Desa Tatengesan, DISPARBUD Daerah Kab. MITRA, PNPM Mandiri Perdesaan, BAPPEDA Kab. MITRA dan pimpinan kelompok nelayan Tatengesan dalam proses dan suksesnya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain, M & Chairiyah, N. 2020. Strategi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Melestarikan Ekowisata Mangrove dan Bekantan di Kelurahan Karang Rejo Tarakan Barat. J-PEN Borneo: Jurnal Ilmu Pertanian, Tarakan. Vol. 3 (1), hal. 1-13.
- Ayob, M. Z., Saman, M. Z., Hussin, Z., & Jusoff, K. 2009. Tourists' Satisfaction on Kilim River Mangrove Forest Ecotourism Services. International Journal of Business and

- Management. Vol. 4 (7): Hal. 76-84.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan. 2022. Kecamatan Pusomaen Dalam Angka 2022. Kabupaten Minahasa Selatan. 122 hal.
- Bengen, D. G. 2001. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Penerbit IPB Press, Bogor. 58 hal.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2021. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah (Renstra DKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Manado. 89 hal.
- Ely, A. J., Tuhumena, L., Sopaheluwakan, J., & Pattinaja, Y. 2021. Strategi Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove di Negeri Amahai. Triton: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan, Ambon. Vol. 17(1), hal. 57-67.
- Hadi, S. P. 2005. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak. Program Studi Megister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irman, I., & Akbar, D. 2021. Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan. Kemudil: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kepulauan Riau. Vol. 6 (1): Hal. 75-82.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peta Mangrove Nasional. Penerbit KLHK, Jakarta. 181 hal.
- Mahi, A. K. 2016. Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi. Penerbit Kencana, Jakarta. 322 hal
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung. 409 hal.
- Mutohharoh, N. 2020. Pengembangan Masyarakat Pesisir Melalui Pemanfaatan Hutan Mangrove Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Jember. 120 hal.
- Mu'tashim, M. R., & Indahsari K. 2021. Pengembangan Ekowisata di Indonesia. Jurnal SENRIABDI: Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian, Surakarta. Vol. 1 (1): Hal. 295-308.
- Noor, Y. R., M. Khazali, dan I.N.N. Suryadiputra. 2006. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. Penerbit Wetlands International - Indonesia Programme, Bogor. 220 hal.
- Onrizal. 2010. Perubahan Tutupan Hutan Mangrove di Pantai Timur Sumatera Utara Periode 1977-2006. Jurnal Biologi Indonesia, Medan. Vol. 6 (2): Hal. 163-172.
- Paruntu, P. C. dan Rumengan, A. P. 2018. Panduan Praktis Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan. Penerbit Unsrat Press, Manado. 169 hal.
- Paruntu, C.P., Rumengan, A. P., Wagey, B. T. 2022. Perencanaan Strategis Kelautan dan Perikanan. Penerbit Major. Minahasa Utara. 108 hal.
- Posundu, S. A. R., Kepel, C. R., Mandagi, V. S., Kalalo, P. F., Paruntu, C. P., Mingkid, W., Boneka, F. B. 2019. Kajian Strategi Pembangunan Zona Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata Di Teluk Manado. Jurnal Ilmiah PLATAX, MSP-FPIK, UNSRAT, Manado. Vol. 7 (1): Hal. 294-308.
- Pramudji. 2002. Eksploitasi Hutan Mangrove di Indonesia: Dampak dan Upaya Untuk Penanggulangannya. Jurnal Oseana: 27 (3), Hal. 11-17.
- Rahim, S., dan D.W.K. Baderan. 2017. Hutan mangrove dan pemanfaatannya. Jurnal Deepublish, Yogyakarta. 78 hal.
- Remus, S. P., Tarmizi, H. B., Daulay, M., dan Rujiman. 2021. Pengaruh Ekonomi Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Planoeath #3, Mataram. Hal. 113-123.
- Rangkuti, F. 1998. Analisis S.W.O.T:

- Teknik Membedah Kasus Bisnis – Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 200 hal.
- Sastrayuda, G. S. 2010. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure. 22 hal.
- Suntoyo, D. 2013. Metode Penelitian Akuntansi. Refika Aditama, Bandung. 188 hal.
- Teh, L dan Cabanban, A. S. 2007. Planning for Sustainable Tourism in Southern Pulau Banggi: an Assessment of Biophysical Conditions and Their Implicationsfor Future Tourism Development. Journal of Environmental Management, Kanada. Vol. 85 (4), Hal. 999-1008.
- Yoeti, O. A. 2006. Pariwisata Budaya: Masalah Dan Solusinya. Jurnal PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 346 hal.